

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Memperkokoh Pembangunan Bangsa Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak

Adi Suryanto^a

^aLembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
e-mail : ^a asuryanto.lanri@gmail.com

Abstrak

Pembangunan bangsa adalah tujuan utama setiap negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakatnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan suatu negara memerlukan upaya penguatan nilai publik yang berdampak positif. Salah satu elemen kunci dalam meraih tujuan ini adalah penguatan nilai publik. Nilai publik dapat dipertimbangkan sebagai bentuk manifestasi dari *outcome* yang disepakati bersama bagi seluruh elemen masyarakat. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana penguatan nilai publik dapat menjadi kunci penting dalam memperkuat pembangunan bangsa. Tentunya dengan memahami bahwa konsep nilai publik sangatlah beragam dan dinamika yang terjadi baik dalam lingkungan internal eksternal telah membawa ke arah baru penciptaan nilai publik yang berdampak lebih besar bagi masyarakat. Dengan menguraikan konsep penguatan nilai publik dan mengilustrasikan contoh konkret, artikel ini menyajikan argumen kuat tentang pentingnya memprioritaskan nilai-nilai yang memperkuat dan mendukung pembangunan bangsa yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Selain itu mendasarkan diri pada prinsip-prinsip keberlanjutan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang aktif, penguatan nilai publik diharapkan dapat membawa dampak positif yang signifikan dalam mewujudkan visi pembangunan bangsa yang kuat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pembangunan Bangsa, Nilai-nilai Kemasyarakatan, Manfaat Berdampak.*

Strengthening Nation Development Through Strengthening Impactful Public Values

Abstract

National development represents the primary objective of every country striving to enhance the well-being and livelihoods of its populace. Achieving societal welfare and sustainable progress necessitates concerted efforts in fortifying positive public values. One pivotal factor in attaining this objective is the reinforcement of public values, which can be regarded as the embodiment of collectively agreed-upon outcomes for all segments of society. This article delves into the significance of strengthening public values as a vital catalyst for nation-building. Recognizing that the concept of public value is multifaceted and shaped by dynamic forces within both internal and external environments, it highlights a fresh approach to generating public value with a more profound societal impact. By elucidating the concept of fortifying public values and providing tangible illustrations, this article articulates a compelling case for prioritizing values that underpin and foster inclusive, sustainable, and equitable nation-building. Furthermore, rooted in the principles of sustainability, transparency, accountability, and active public engagement, the reinforcement of public values is poised to yield a substantial and positive impact in realizing the vision of robust and enduring national development.

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Keywords: *Nation Development, Public Values, Impactful Benefit.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia, semenjak merdeka tahun 1945 dan telah beranjak usia ke 78 tahun lamanya telah mengalami fase dan dinamika sebagai Bangsa dan Negara. Salah satu ciri semboyan penting Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia memiliki ragam budaya, etnis, dan agama namun tentu tujuannya tetap satu sebagai bangsa dan negara Indonesia. Tujuan mulia sebagai negara berdaulat, maju dan mandiri telah ditegaskan sebagai cita - cita Bangsa, visi Indonesia Emas nantinya bukan hal sekedar mimpi, tapi arah bersama yang memandu seluruh elemen Bangsa dengan segala potensi yang dimilikinya. Dan tentunya, salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui penguatan nilai publik.

Nilai publik atau nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adalah faktor yang sangat penting dalam pembangunan di sebuah masyarakat (Liddle, 2017; Shaw, 2013), seperti halnya dalam negara-negara lain. Pembangunan ini dapat dilihat dalam beberapa skala baik regional maupun lokal (Afandi et al., 2021a, 2021b). Bagaimana pemerintah Indonesia dan organisasi publik memberikan layanan dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga negaranya, berkontribusi terhadap konsep nilai publik di negara ini. Hal ini bukan sekedar tertanam dalam falsafah hidup, ideologi, maupun kesadaran dari masyarakat sebagai suatu bangsa, tetapi dapat menjadi tujuan utama dari suatu bangsa.

Beberapa penulis sebelumnya telah menyampaikan pertimbangan pentingnya nilai publik dikembangkan dengan baik (de Jong et al., 2017; Liddle, 2017; Moore, 1995; Todorut & Tselentis, 2015) antara lain :

1. Hal ini berkaitan dengan legitimasi dan kepercayaan. Keputusan dan atau

tindakan yang dilakukan pemerintah dan Lembaga tentu diharapkan "impactful" atau berdampak penting salah satunya meningkatkan kepercayaan dari Masyarakat atas penyedia pelayanan publik. Namun baik setiap tindakan maupun dampak tersebut harus terlegitimasi dengan baik.

2. Nilai publik penting dalam proses kohesi sosial di Masyarakat. Dengan kohesi sosial yang kuat nantinya perasaan identitas sebagai bangsa dan negara serta "sense of belonging" diantara warga negara dapat memperkuat persatuan dan kesatuan
3. Nilai publik yang baik dapat berperan pengambilan keputusan yang etis. Dengan membangun konsensus bersama tentang arah kebaikan bersama maka pengambilan keputusan etis dapat dilakukan, tentu hal ini berlaku tidak hanya di organisasi sektor publik saja, tetapi juga pada sektor privat.
4. Nilai publik menjadi alasan kuat untuk melakukan penyesuaian dalam Kebijakan serta peraturan pemerintah dan undang - undang yang berlaku dengan mencerminkan preferensi dan prioritas masyarakat. Pada akhirnya keselarasan Kebijakan dengan berlandaskan pada nilai publik yang berlaku bermanfaat untuk penguatan tata kelola organisasi.
5. Nilai publik pada akhirnya dapat memberikan manfaat penting pada kualitas hidup Masyarakat. Secara umum melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur, ataupun program sosial yang berkualitas akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran hidup Masyarakat.

Namun, penting sekali untuk memahami tentang nilai publik dan bagaimana melakukan pengukuran atas konsep tersebut. Pengukuran nilai publik ini dipahami dan dimaknai dengan cara yang

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

beragam. Sebagai contoh apakah nilai publik diukur melalui efisiensi layanan, keadilan dalam layanan, pendapatan domestik bruto, kebahagiaan dari masyarakat ataukah terdapat indikator lain dalam pengukuran nilai publik ini di masyarakat. Tantangan dari mengukur nilai publik ini telah dikenali dengan baik oleh para peneliti sebelumnya (Guthrie & Russo, 2014). Terlepas dari hal tersebut diatas, pernyataan nilai yang mengungkapkan nilai-nilai yang dimiliki bersama di seluruh tingkat organisasi – dikombinasikan dengan penyebaran peran kepemimpinan di seluruh organisasi – memberikan landasan yang sangat kuat untuk mengintegrasikan nilai-nilai ke dalam pelayanan publik (Kernaghan, 2003).

Secara umum yang paling sering dilakukan dalam pengukuran nilai publik dikenali dengan survei dan jajak pendapat. Survei dan jajak pendapat digunakan untuk mengukur opini publik tentang isu yang ada di Masyarakat dan Pemerintahan, serta memberikan wawasan tentang aspek legitimasi tindakan pemerintah apakah telah sejalan dengan nilai – nilai publik atau belum. Survei ini secara umum menilai tentang kepuasan (perbandingan diantara ekspektasi dan yang dirasakan di lapangan) selain dengan kepercayaan atau dukungan atas Kebijakan tertentu yang berlaku.

Selain survei dan jajak pendapat, pengukuran nilai publik juga dapat dilakukan melalui mekanisme yang dijalankan oleh Analisis Kebijakan. Para analisis Kebijakan ini akan menelaah serta menganalisa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh lembaga dan lembaga pemerintah untuk menentukan keselarasan dengan nilai-nilai publik. Analisis ini dapat mencakup penilaian apakah kebijakan mendorong kesetaraan, keadilan, dan kebaikan bersama. Sebagai contoh beberapa kajian menyebutkan pentingnya kesetaraan dalam upaya pemerataan pembangunan di Indonesia (Anomsari, 2020; Ramdani, 2019).

Kedua, pengukuran nilai publik dikembangkan dan dilakukan dengan cara

Penentuan metrik kinerja, dimana metrik kinerja yang dikembangkan ini berkaitan dengan nilai-nilai publik, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan sosial, dapat membantu mengukur hasil kebijakan dan program.

Pengukuran nilai publik juga dapat dilakukan dengan cara Keterlibatan Masyarakat, dimana ada keterlibatan warga negara yang aktif dalam proses pengambilan keputusan (Guthrie & Russo, 2014). Aspek keterlibatan menjadi indikator penting tentang seberapa baik penegakan nilai publik yang berlaku di Masyarakat. Keterlibatan ini juga dapat melalui mekanisme dengar pendapat, konsultasi maupun partisipasi publik dalam Pemerintahan (Anomsari & Abubakar, 2019; Ramdani et al., 2020).

Selain keempat hal tersebut, dua cara lain dalam pengukuran nilai publik adalah melalui Indikator Sosial. Penilaian pada indikator sosial penting untuk mengungkap beberapa hal seperti ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan, kejahatan, serta hasil kesehatan yang dicapai di masyarakat. Seperti halnya kemakmuran masyarakat di Desa sebagai salah satu bagian terkecil dari pemerintahan menjadi perhatian bersama (Taufik et al., 2022; Wijayanti & Taufik, 2022). Hal ini dapat memberikan wawasan bagi para stakeholder tentang dampak Kebijakan atas kesejahteraan Masyarakat dan apakah hal ini telah sejalan dengan nilai – nilai publik.

Terakhir, pengukuran nilai publik dapat dilihat pada aspek Transparansi dan Akuntabilitas, dengan pengukuran transparansi dan akuntabilitas ini maka pemerintah mengupayakan kepercayaan dari Masyarakat yang tinggi pada penyelenggara Pemerintahan dan pelayanan publik (Liddle, 2017; Pang et al., 2014). Selain itu hal ini dapat membantu menilai komitmen pemerintah dalam menjunjung tinggi nilai publik (kepercayaan dapat diperoleh dari tingkat indeks korupsi, kepatuhan supremasi hukum, serta efektivitas mekanisme pengawasan). Pada institusi pemerintah pusat seperti Lembaga

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Administrasi Negara (LAN) RI mencakup seluruh satuan kerjanya, penguatan akuntabilitas turut menjadi perhatian dan terus diupayakan perbaikannya secara berkelanjutan (Pradesa et al., 2021, 2023).

Berdasarkan ragam pengukuran nilai publik tersebut, maka hal ini tentu akan bermanfaat bagi para stakeholder pemerintah. Dalam konteks stakeholder internal, dikenali konsep "strategic triangle" dari nilai publik ini dikaitkan dengan aspek legitimasi dan dukungan serta kapabilitas operasional dari sebuah institusi publik.

Secara prinsip ada tiga hal penting dari perspektif strategis antara lain :

1. Nilai publik akan membantu manajer atau Pimpinan organisasi publik memposisikan organisasi yang mereka pimpin dalam lingkungan yang kompleks dan dinamis
2. Nilai publik akan mendukung dalam memfokuskan dan mendistribusikan perhatian manajerial di seluruh "Lingkungan Tugas" dan "Lingkungan Otorisasi" mereka
3. Nilai publik akan membantu manajer atau Pimpinan organisasi publik merencanakan proposisi Nilai Publik berkelanjutan yang ingin dicapai

Sebagai contoh, SPBE atau sistem Pemerintahan berbasis elektronik yang dicanangkan oleh KemenpanRB telah dikembangkan menjadi salah satu model pengukuran berupa indeks SPBE. Tentunya hal ini dapat dipahami sebagai upaya peningkatan daya saing instansi pemerintah agar lebih agile, adaptif, dan responsif atas perubahan serta dinamika lingkungan terutama lingkungan eksternal serta ekspektasi dari Masyarakat sebagai pengguna layanan. Pada akhirnya hal ini juga dapat dimaknai sebagai upaya peningkatan legitimasi serta dukungan dari stakeholder maupun peningkatan kapabilitas operasional dari instansi pemerintah. Contoh lainnya adalah 16 instansi pemerintah yang bepredikat sangat

baik pada pemantauan dan evaluasi SPBE di tahun 2022, dan menjadi kebanggaan dan capaian kami bahwa LAN RI termasuk dalam predikat sangat baik tersebut.

Selain itu reformasi birokrasi sebagai pergerakan yang masif dari seluruh elemen pemerintah yang tentunya lebih berorientasi pada nilai publik. Kemenpan RB secara konsisten telah melakukan upaya perbaikan dan penguatan salah satunya tentang peningkatan kualitas pelayanan publik bagi instansi pemerintah. Sebagai informasi pula bahwa indeks pelayanan publik nasional mengalami peningkatan di tahun 2022 setelah sebelumnya sempat terkoreksi turun sebesar 1,3 persen dari tahun 2020 ke 2021, tahun berikutnya mencatat pergerakan positif naik sebesar 2,37 persen menjadi 3,88. Meskipun indeks ini tergolong tinggi, tetapi tidak menjadi alasan semua pihak untuk cepat berpuas diri. Masih banyak ruang dan area yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar tren positif dalam penilaian ini selalu terjaga setiap tahunnya.

Dari beberapa fenomena penting sebelumnya tentang nilai publik di Indonesia, maka diyakini penting untuk melakukan penguatan nilai publik ini dalam rangka untuk mengakselerasi serta memperkokoh proses Pembangunan di Indonesia. Berbagai penguatan nilai publik ini setidaknya dapat dicapai dengan melaksanakan enam aspek penting seperti pendidikan dan pembelajaran, pemberantasan korupsi, kampanye kesadaran Masyarakat, promosi budaya dan kearifan lokal, pengembangan keterampilan, serta kolaborasi dan sinergi antar stakeholder (Sufianti et al., 2021). Keenam aspek ini merupakan dimensi - dimensi penting yang dapat menjadi fokus area penguatan nilai publik di Masyarakat.

B. PEMBAHASAN

Berbicara upaya pencapaian Nilai Publik dalam konteks di Lembaga Administrasi Negara RI, kontribusi yang telah kami hasilkan sejauh ini ada tiga hal yang menjadi capaian milestone penting. Pertama, inovasi

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

sektor publik. LAN terus mendorong inovasi sektor publik, melalui penerapan laboratorium inovasi yang telah mampu menghasilkan lebih dari 12.236 ide inovasi dari 117 provinsi, Kabupaten dan kota. Melalui program tersebut pada kenyataannya telah berkontribusi pada mengatasi ketimpangan pelayanan publik terutama di kawasan 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).

Kedua, transformasi pengembangan kompetensi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam metode pembelajaran pelatihan dasar (Latsar) CPNS, berhasil melakukan efisiensi pembiayaan pengembangan kompetensi sebesar 43,68 persen atau senilai Rp.1,2 triliun.

Ketiga, agen perubahan serta agen inovasi. LAN telah berhasil melahirkan 35.593 alumni beserta perubahan dan inovasi yang telah dilakukan dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun. Ketiga capaian atau hal penting ini menunjukkan posisi strategis LAN RI dalam upaya pencapaian nilai publik di Indonesia.

Sebagai tambahan informasi, dalam rangka HUT LAN RI juga kami inisiasikan dan sinergikan dengan upaya Mendorong Penciptaan dan Pencapaian Nilai Publik di Indonesia. Dengan tajuk 66 Tahun Membangun Negeri, LAN RI Memberikan Award kepada ASN, Lembaga Pelatihan dan Daerah Berprestasi dalam rangka HUT LAN RI ini (Penghargaan Makarti Bhakti Nagari).

Menyinggung tentang kepercayaan Masyarakat (*citizen trust*) pada Lembaga pemerintah merupakan salah satu aspek penting yang tak luput dari perhatian pada penguatan nilai publik. Konsep *citizen trust* diindikasikan oleh tiga hal yakni kompetensi, kebajikan, dan kejujuran. Sebagai contoh data yang diperoleh pada bulan April 2023 kemarin menunjukkan bahwa TNI merupakan Lembaga Pemerintah yang cenderung paling dipercaya oleh Masyarakat, berbanding terbalik dengan partai politik. Tentunya kepercayaan pada Lembaga pemerintah tersebut merupakan

tingkat keyakinan Masyarakat atas 1. kompetensi, 2. kebajikan, serta 3. kejujuran dari Lembaga tersebut.

Tidak luput dari perhatian semua adalah tentang aspek ketahanan nasional. Ketahanan nasional bukan semata-mata soal keamanan dan pertahanan, tetapi juga tentang kedaulatan negara. Bangsa dan negara yang berdaulat sepenuhnya menjadi faktor kritis lain dalam penguatan nilai publik. Bagaimanapun dinamika dan bahkan turbulensi lingkungan eksternal yang terjadi, seperti misalnya bentuk perang proxy non fisik (misal perang ideologi, perang cyber) harus diwaspadai dan diantisipasi semua tanpa terkecuali. Kedaulatan harus terjaga baik secara *tangible* bahkan *non tangible*.

Semangat patriotisme adalah kunci untuk menegakkan kedaulatan, tentunya untuk melindungi tanah air dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pada akhirnya, figur pemimpin dan kepemimpinan yang baik adalah faktor pemicu, pendorong, dan pengawal dari proses penguatan nilai publik dalam memperkokoh pembangunan di Indonesia. Seorang pemimpin (dan pola kepemimpinan) yang baik akan berpengaruh pada kemaslahatan, kebaikan, dan ketahanan di seluruh lapisan masyarakat (Ritz et al., 2014). Hal ini tentu berlaku di sektor pemerintah, privat, organisasi nirlaba maupun organisasi lainnya yang berorientasi pada penciptaan lingkungan yang lebih baik : Adil, Transparan, serta Efisien.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Penguatan nilai publik adalah fondasi yang krusial dalam menjalani perjalanan menuju Indonesia yang berdaulat, maju, dan mandiri. Dengan kesatuan dalam nilai-nilai ini, Indonesia dapat mencapai potensinya sebagai negara yang kuat, adil, dan berdaya saing tinggi dalam kancah global. Dengan langkah-langkah yang tepat, penguatan nilai publik dapat menjadi motor pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan mencapai kemakmuran, penting bagi semua pihak untuk terus terlibat dan berpartisipasi aktif

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

dalam proses ini secara berkelanjutan dan tentunya berkeadilan serta berdampak baik bagi seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia.

Dalam rangka mencapai visi Indonesia yang maju dan mandiri, konsolidasi nilai-nilai ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu, upaya penguatan nilai publik harus menjadi prioritas bersama bagi semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Hanya dengan kerja sama yang kokoh dan komitmen yang tulus, kita dapat menggerakkan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan, di mana semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mendapatkan manfaat dari kemajuan bangsa ini.

Sebagai tambahan, kesatuan dalam nilai-nilai ini juga dapat menjadi landasan bagi Indonesia untuk bersaing secara global. Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, Indonesia harus mampu menjaga integritas dan identitasnya sambil tetap terbuka terhadap perkembangan dunia. Dengan penguatan nilai publik yang kokoh, Indonesia dapat menjadi aktor yang lebih berpengaruh dalam kancah internasional, berkontribusi positif terhadap perdamaian dunia, dan membawa kemakmuran kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, peran setiap individu dalam mempromosikan dan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Hanya dengan komitmen bersama, Indonesia dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

REFERENSI

- Afandi, M. N., Anomsari, E. T., & Novira, A. (2021a). A Conceptual Model of Localizing the SDGs: Lesson Learned from the Local Development Plan and Practice in Indonesia. *Review Of International Geographical Education*, 11(8), 1707-1716. <https://doi.org/10.48047/rigeo.11.08.1>
- Afandi, M. N., Anomsari, T., & Novira, A. (2021b). Sustainable Development Goals (SDGs) Perspective in Regional Development Planning and Implementation (The Case of Bandung Regency, West Java, Indonesia). *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 564(Proc. 2nd Int. Conf. Adm. Sci. 2020 (ICAS 2020)), 43-47.
- Anomsari, E. T. (2020). The Impacts of International Migration on Development in Indonesia: a Literature Review. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 20(2), 74-84. <https://doi.org/10.20961/jiep.v20i2.42197>
- Anomsari, E. T., & Abubakar, R. R. T. (2019). Program Pembangunan Partisipatif dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Natapraja:Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 121-138. <https://doi.org/10.21831/jnp.v7i1.22157>
- de Jong, J., Douglas, S., Sicilia, M., Radnor, Z., Noordegraaf, M., & Debus, P. (2017). Instruments of value: using the analytic tools of public value theory in teaching and practice. *Public Management Review*, 19(5), 605-620. <https://doi.org/10.1080/14719037.2016.1192162>
- Guthrie, J., & Russo, S. (2014). Public Value Management: Challenge of Defining, Measuring and Reporting for Public Services. *Public Value Management, Measurement and Reporting Studies in Public and Non-Profit Governance*, 3, 3-17. <https://doi.org/10.1108/s2051-663020140000003023>
- Kernaghan, K. (2003). Integrating Values into Public Service: The Values Statement as Centerpiece. *Public Administration Review*, 63(6), 711-719. <https://doi.org/10.1111/1540-6210.00334>
- Liddle, J. (2017). Public Value Management and New Public Governance: Key

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

- Traits, Issues and Developments. *The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe*, 967-990. https://doi.org/10.1057/978-1-137-55269-3_49
- Moore, M. H. (1995). *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Harvard University Press.
- Pang, M. S., Lee, G., & Delone, W. H. (2014). In public sector organisations: A public-value management perspective. *Journal of Information Technology*, 29(3), 187-205. <https://doi.org/10.1057/jit.2014.2>
- Pradesa, H. A., Agustina, I., & Wijayati, I. Y. (2023). Pelaksanaan Review Kerangka Kerja Manajemen Risiko Pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 330-343.
- Pradesa, H. A., Purba, C. O., & Priatna, R. (2021). Menilai risiko dari organisasi yang bertransformasi: pelajaran terbaik untuk penguatan akuntabilitas pendidikan tinggi di Indonesia. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 9(2), 146-158.
- Ramdani, E. M. (2019). Analisis Keberlanjutan Inovasi Lokal: Studi Kasus Inovasi e-Health Cimalaka Sehat. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 22(2), 163-182. <https://doi.org/10.31845/jwk.v22i2.159>
- Ramdani, E. M., Maasir, L., & Artisa, R. A. (2020). Strategi Community Engagement Dalam Program Gema Madani Simpati (Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif) di Kota Tasikmalaya. *Moderat: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 728-743.
- Ritz, A., Giauque, D., Varone, F., & Anderfuhren-Biget, S. (2014). From Leadership to Citizenship Behavior in Public Organizations: When Values Matter. *Review of Public Personnel Administration*, 34(2), 128-152. <https://doi.org/10.1177/0734371X14521456>
- Shaw, R. (2013). Another Size Fits all? Public Value Management and Challenges for Institutional Design. *Public Management Review*, 15(4), 477-500. <https://doi.org/10.1080/14719037.2012.664017>
- Sufianti, E., Jubaedah, E., & Abdullah, S. (2021). Building Sustainability of Public Service Innovation in Bandung City, West Java, Indonesia. *Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210629.005>
- Taufik, N. I., Pradesa, H. A., & Agustina, I. (2022). Persepsi Risiko Pada Pemerintahan Desa: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 16(1), 120-135. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v16i1.353>
- Todorut, A. V., & Tselentis, V. (2015). Designing the Model of Public Value Management. *Proceeding of The 9th International Management Conference*, 74-80.
- Wijayanti, R., & Taufik, N. I. (2022). The Role of Village Funds to Improve Community Welfare: A Study in West Bandung Regency. *International Journal of Entrepreneurship and Business Development*, 05(01), 155-163. <https://doi.org/10.29138/ijebd.v5i1.1641>